



# Kemiskinan Multidimensi dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia

Multidimensional Poverty and Human Development Index in Indonesia

M Rafi Farrel Fuady<sup>1</sup>, Mirza Fuady<sup>2</sup> dan Fahmi Aulia<sup>1</sup>

Diterima: 10 Februari 2021

Disetujui: 23 Juni 2021

**Abstrak:** Masalah kemiskinan merupakan persoalan yang umum dihadapi oleh hampir semua wilayah di dunia termasuk Indonesia. Hasil kajian beberapa penelitian menunjukkan masalah kemiskinan umumnya berhubungan dengan beberapa faktor seperti kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi. Dimana menurunnya kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah akan berdampak negatif naiknya tingkat kemiskinan, begitupula sebaliknya. Berdasarkan data dari BPS diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia di Indonesia terus meningkat, namun angka kemiskinan tidak turun secara signifikan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia dengan kemiskinan. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan dan menganalisis data terkait kemiskinan, indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah di Indonesia dan menjadikannya sebagai rujukan untuk memahami hubungan pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia dengan kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun angka pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia semakin baik, namun masih banyak indikator kemiskinan di Indonesia yang belum membaik. Hal tersebut berdampak lambatnya proses menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Untuk itu pendekatan multidimensi dalam mengukur kemiskinan diharapkan dapat mengatasi kekurangan tersebut dan mendukung terciptanya kebijakan yang lebih baik dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia.

*Kata Kunci: Kemiskinan Multidimensi, Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi*

**Abstract:** The problem of poverty is a common problem faced by almost all regions in the world, including Indonesia. The results of the study of several studies show that the problem of poverty is generally related to several factors such as the quality of human resources and economic growth. Where the decline in the quality of human resources and economic growth in an area will have a negative impact on increasing poverty levels, and vice versa. Based on data from BPS, it is known that economic growth and the human development index in Indonesia continue to increase, but the poverty rate has not decreased significantly. Therefore, this study was conducted with the aim of knowing and describing the relationship between economic growth and the human development

<sup>1</sup> Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala

<sup>2</sup> Prodi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala

index with poverty. This descriptive study uses a qualitative approach by collecting and analyzing data related to poverty, human development index and economic growth in several regions in Indonesia and using it as a reference to understand the relationship between economic growth and human development index with poverty in Indonesia. The results of the study show that although the economic growth rate and human development index are getting better, there are still many poverty indicators in Indonesia that have not improved. This has resulted in the slow process of reducing poverty in Indonesia. For this reason, a multidimensional approach in measuring poverty is expected to overcome these shortcomings and support the creation of better policies in overcoming poverty in Indonesia.

*Keywords: Multidimensional Poverty, Human Development, Economic Growth*

## PENDAHULUAN

Kemiskinan umumnya masih diukur dengan pendekatan tunggal moneter atau pendapatan. Pendekatan ini dinilai tidak dapat membedah kemiskinan secara mendalam karena kompleksitas kemiskinan bukan hanya pada kekurangan pendapatan (Prakarsa, 2020a). Kebutuhan dasar manusia, seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak seharusnya menjadi gambaran utama mengukur kemiskinan. Kemiskinan tidak bisa ditafsirkan secara sederhana namun butuh pendekatan secara multidimensi untuk memahami fenomenanya. Untuk itu pengukuran kemiskinan dengan menggunakan pendekatan multidimensi menjadi pilihan yang lebih bijak sehingga strategi untuk menurunkan angka kemiskinan dapat dicapai secara optimal.

Hal tersebut sejalan pendapat Suryawati (2005), yang menyatakan bahwa pembangunan yang berlangsung saat ini tidak mampu meredam bertambahnya jumlah penduduk miskin di seluruh dunia, khususnya di negara berkembang. Kenyataan ini menunjukkan perumusan dan penerapan kebijakan untuk menghapus kemiskinan dan meningkatkan kemampuan penduduk miskin belum sepenuhnya tepat. Umumnya kebijakan mengenai kemiskinan hanya mengkaji dimensi ekonomi dengan pertimbangan bahwa dimensi ekonomi yang paling mudah dipelajari dan dianalisis. Fakta menunjukkan kemiskinan juga berhubungan dengan dimensi lain seperti dimensi sosial, politik, budaya, lingkungan, pendidikan, kesehatan, agama, dan perilaku. Memahami kemiskinan dengan mempertimbangkan berbagai dimensi tersebut mutlak diperlukan agar tujuan perumusan kebijakan menurunkan kemiskinan dapat cepat tercapai.

Pemerintah Indonesia melalui Badan Pusat Statistik (BPS) secara berkala telah melakukan pengukuran kemiskinan dengan menggunakan pendekatan moneter berupa garis kemiskinan makanan dan non makanan sebagai penentu titik potong yang membagi penduduk antara miskin dan tidak miskin (Kristianto & Prasetya, 2017). Hasil dari pengukuran tersebut menunjukkan besarnya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan termasuk dalam kategori mengalami kemiskinan moneter. Meski pengukuran dengan pendekatan dimensi moneter secara tunggal sudah memperoleh hasil yang baik dalam mengukur kemiskinan, namun pendekatan tersebut belum dapat menangkap semua aspek kesejahteraan.

Selain persoalan diatas, peningkatan jumlah penduduk suatu wilayah dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi juga harus menjadi pokok perhatian. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan mengakibatkan sulitnya pencapaian kesejahteraan serta turunnya angka kemiskinan sebagai tujuan pembangunan ekonomi (Safuridar & Putri, 2019). Tingginya angka pertumbuhan penduduk dikhawatirkan dapat berdampak buruk berupa terkurasnya sumber daya dan rusaknya lingkungan, yang nantinya dapat memunculkan masalah sosial baru, seperti kelaparan, kemiskinan, dan keterbelakangan.

Demikian pula kualitas sumber daya manusia pada suatu wilayah juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kemiskinan. Rendahnya kualitas sumber daya

manusia sebagaimana dapat dilihat pada laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu wilayah, akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk wilayah tersebut. Selanjutnya produktivitas yang rendah akan berakibat pada rendahnya pendapatan yang diperoleh, sehingga dapat membawa seseorang jatuh dalam kemiskinan.

Berdasarkan data dari BPS diketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya (BPS, 2020a). Demikian pula angka pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia di Indonesia juga terus meningkat (BPS, 2020b), namun angka kemiskinan tidak turun secara signifikan. Untuk itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia dengan kemiskinan di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia dengan kemiskinan di Indonesia.

## METODE

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dialami oleh seseorang dalam menjalani kehidupannya mencapai taraf yang manusiawi. Kemiskinan dapat juga diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar dan memperbaiki kondisi hidupnya (Baniadi, 2018). Sejatinya fenomena kemiskinan tidak hanya diukur dari kemampuan memenuhi kebutuhan material dasar saja, namun juga terkait erat dengan beberapa dimensi lain kehidupan manusia, seperti pendidikan, kesehatan, jaminan masa depan, dan peranan sosial.

Untuk itu kemiskinan hendaknya tidak dilihat hanya sebagai fenomena ekonomi yang berkaitan dengan kurangnya pendapatan dan pemenuhan kebutuhan pokok, namun kemiskinan juga menyangkut peluang seseorang untuk mengembangkan taraf kehidupannya (Ningsih & Syechalad, 2016). Selanjutnya kompleksitas dimensi kemiskinan telah menjadikannya sebagai persoalan rumit membentuk perangkat kemiskinan yang terdiri dari kemiskinan atau ketidakmampuan, kelemahan secara jasmani dan rohani, serta kerentanan, yang secara umum akan meningkatkan risiko dan turunya ketahanan terhadap bencana (Fuady dkk, 2020).

Adapun kemiskinan multidimensi merupakan tinjauan dari berbagai deprivasi (kekurangan) yang dialami oleh warga miskin dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti kesehatan yang buruk, standar hidup yang tidak memadai, pendidikan yang minim, ketidakberdayaan, kualitas pekerjaan yang buruk, ancaman kekerasan, dan tinggal di lingkungan yang berbahaya (Prakarsa, 2020b). Pengukuran kemiskinan multidimensi dapat memuat berbagai indikator yang menangkap kompleksitas fenomena untuk selanjutnya menjadi dasar rumusan kebijakan yang tepat dalam mengurangi kemiskinan dan kelemahan di suatu wilayah. Indikator ini dapat dipilih sesuai konteks dan tujuan pengukuran, untuk mencerminkan kebutuhan dan prioritas wilayah tersebut.

Sementara itu pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu wilayah, memiliki tujuan yang paling penting dari suatu pembangunan yaitu pengurangan angka kemiskinan, yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi atau melalui redistribusi pendapatan (Soleh, 2012). Dalam kegiatan nyata, pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fisik, berupa penambahan produksi barang dan jasa, dan perkembangan infrastruktur dalam suatu wilayah. Semua pertumbuhan ekonomi tersebut biasanya diukur dari perkembangan pendapatan riil yang dicapai suatu wilayah dalam periode tertentu (Dewi, 2017).

Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang disusun dari tiga indikator yaitu lama hidup, pendidikan dan standar hidup (Setiawan & Hakim, 2013). Menurut UNDP dalam Garibaldi & Hidayat (2014), pembangunan

manusia adalah proses memperluas pilihan penduduk terhadap tiga pilihan utama yang dianggap paling penting, yaitu peluang hidup panjang umur dan sehat (*longevity*), berpendidikan dan berpengetahuan (*knowledge*), dan akses ke sumber daya yang dapat memenuhi standar hidup yang layak (*living standard*). Peluang hidup yang dimaksudkan adalah peluang hidup yang dihitung berdasarkan angka kehidupan ketika lahir, sementara pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lamanya bersekolah dan angka melek huruf penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, sedangkan hidup yang layak yang dimaksudkan ialah diukur dengan pengeluaran per-kapita yang didasarkan pada kemampuan atau daya beli.

Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan padanan dengan *Human Development Index* (HDI) digunakan juga untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk ke dalam kategori negara maju, negara berkembang, ataupun negara terkebelakang. Selanjutnya indeks ini juga dapat menjadi parameter untuk melihat pengaruh kebijakan ekonomi suatu negara terhadap kualitas rakyatnya (Najmi, 2019).

Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam mengkaji berbagai pustaka terkait kemiskinan, indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah di Indonesia dan menjadikannya sebagai rujukan dalam memahami hubungan pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia dengan kemiskinan di Indonesia. Data kajian pustaka bersumber dari artikel jurnal, laporan penelitian, dokumen resmi pemerintah, serta sumber-sumber lain dari berbagai media terpercaya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kemiskinan Multidimensi di Indonesia**

Penelitian mengenai kemiskinan multidimensi di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Diantaranya adalah laporan yang menyajikan analisis penghitungan Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) Indonesia untuk periode tahun 2015 hingga 2018 (Prakarsa, 2020b). Laporan tersebut fokus pada paparan profil kemiskinan multidimensi nasional dan setiap provinsi di Indonesia. Analisis profil kemiskinan meliputi jumlah penduduk miskin, keparahan kemiskinan dan indeks kemiskinan multidimensi.

Adapun indikator yang dipakai dalam penelitian tersebut pada dimensi kesehatan adalah sanitasi, air minum yang layak dan gizi seimbang balita. Pada dimensi pendidikan, indikator yang dipakai adalah keikutsertaan pendidikan prasekolah dan keberlanjutan sekolah. Sedangkan pada dimensi standar hidup, indikator yang digunakan adalah sumber penerangan, bahan bakar memasak serta kondisi atap, lantai, dinding tempat tinggal.

Diungkapkan dalam laporan tersebut bahwa persoalan sanitasi, akses air minum dan bahan bakar memasak masih menjadi indikator utama penyumbang kemiskinan multidimensi. Begitu pula indikator asupan gizi balita, keikutsertaan pendidikan prasekolah dan keberlanjutan sekolah (tidak pernah sekolah) meningkat setiap tahun.

Laporan tersebut menyatakan bahwa jumlah penduduk miskin multidimensi menunjukkan tren penurunan pada periode tahun 2015–2018 jika dibandingkan dengan periode sebelumnya tahun 2012–2014. Pada periode tahun 2015–2018, hasil penghitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2015, penduduk miskin multidimensi mencapai lebih dari 34 juta orang atau 13,53 persen terhadap jumlah penduduk. Pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin multidimensi turun menjadi 21,5 juta orang atau sekitar 8,17 persen dari total penduduk Indonesia.

Penurunan kemiskinan multidimensi di Indonesia tidak terlepas dari kontribusi program-program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah dan meningkatnya alokasi anggaran kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, yang turut mempercepat

penurunan angka kemiskinan. Pemerataan program sosial oleh pemerintah juga lebih dapat dirasakan oleh masyarakat, seperti meningkatnya rumah tangga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu, juga ada program perbaikan infrastruktur dasar yang progresif, seperti pembangunan sanitasi berbasis masyarakat dan perumahan rakyat (Prakarsa, 2020b).

Menurut Wahyuningsih & Zamzami (2014), Aceh merupakan provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi, bahkan pada tahun 2014, tingkat kemiskinan di Aceh jauh di atas rata-rata nasional kemiskinan di Indonesia yang hanya mencapai 12,25 persen. Meskipun demikian, tingkat kemiskinan di Aceh mengalami penurunan cukup tajam dari 28,7 pada tahun 2006 menjadi 18,05 pada tahun 2014.

Sejalan dengan itu menurut Prakarsa (2020b), kemiskinan multidimensi di Aceh mengalami tren penurunan selama kurun waktu 2015 hingga 2018. Pada tahun 2015 tercatat Angka Kemiskinan Multidimensi (AKM) di kota dan desa menunjukkan angka sebesar 13,70 persen, sedangkan pada 2018 AKM di kota dan desa sebesar 7,30 persen. Turunnya AKM di Aceh sebesar 6,40 persen, ekuivalen dengan penurunan jumlah penduduk miskin hampir 300 ribu jiwa. Hingga 2018, dari total penduduk miskin multidimensi sebanyak 384 ribu jiwa, paling banyak terdeprivasi pada indikator air minum yaitu sebanyak 86,28 persen atau 331 ribu jiwa. Dalam skala nasional, tren penurunan ini menempatkan Aceh di peringkat ke-24 dari 34 provinsi pada 2018 dengan IKM sebesar 0,027.

Hasil analisis AKM di Aceh lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan moneter (lihat Gambar 1). Pada tahun 2018, angka kemiskinan moneter masih mencapai dua digit, sedangkan AKM sudah satu digit. Angka kemiskinan moneter di provinsi ini bahkan berada di atas rata-rata nasional. Ini menunjukkan bahwa dari sisi pendapatan, kondisi masyarakat miskin belum lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional dan juga masih terdapat persoalan kemiskinan multidimensi di mana banyak penduduk miskin yang belum mendapatkan haknya memperoleh pendidikan, kesehatan maupun standar hidup yang layak.



Sumber: Prakarsa, 2020b

**Gambar 1. Perbandingan AKM dan Angka Kemiskinan Moneter di Provinsi Aceh**

Gambar 1 menunjukkan bahwa AKM mengalami penurunan yang lebih signifikan dibandingkan angka kemiskinan moneter. Dalam kurun waktu 2015 hingga 2018, AKM turun hingga 6,40 persen sementara penurunan angka kemiskinan moneter hanya 1,27 persen. Ini menunjukkan bahwa perbaikan penduduk miskin dari sisi kesehatan, pendidikan dan standar hidup lebih progresif, sedangkan perbaikan dari segi pendapatan masih berjalan lambat (Prakarsa, 2020b).

#### **Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia**

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dan untuk wilayah/regional dalam suatu periode tertentu dapat dilihat dari data

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya (Wahyuningsih dan Zamzami, 2014).

Selanjutnya proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor yang terdiri dari faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi mencakup sumber daya alam atau tanah, akumulasi modal, organisasi, dan kemajuan teknologi, sedangkan faktor non ekonomi meliputi sumber daya manusia serta faktor politik dan administratif.

Kualitas sumber daya manusia yang ada di suatu daerah dapat dilihat dari angka indeks pembangunan manusia. Semakin tinggi indeks pembangunan manusia di suatu daerah, maka hasil pembangunan manusia oleh pemerintah semakin berhasil dan akan menjadi kunci pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Secara parsial pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan adalah positif namun tidak signifikan. Hal ini memberikan makna bahwa indeks pembangunan manusia tidak dapat dijadikan pertimbangan untuk melihat tingkat kemiskinan.

### **Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia dengan Kemiskinan**

Pada hakikatnya pembangunan ekonomi adalah mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah melalui kuasa yang dimilikinya mengatur distribusi sumber daya secara adil dan wajar kepada masyarakat dengan semangat pelayanan. Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan mempunyai kewajiban membayar pajak kepada negara agar pemerintahan dapat berjalan dan kesejahteraan dapat tercapai (Santoso, dkk, 2013).

Menurut Prasetyoningrum & Sukmawati (2018), tidak tercapainya kesejahteraan atau dengan kata lain terjadinya kemiskinan, dapat disebabkan oleh kekurangan pada faktor sumber daya alam dan manusia. Ketersediaan sumber daya alam akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kurangnya sumber daya alam akan menyebabkan kemiskinan karena sumber daya alam adalah sumber utama kebutuhan hidup manusia.

Sementara itu pengelolaan sumber daya alam sangat tergantung pada kemampuan produktif manusia. Jika penduduknya berpendidikan rendah maka akan mengakibatkan langkanya keterampilan teknik, pengetahuan, dan aktivitas kewiraswataan yang secara otomatis akan menyebabkan sumber daya alam yang tersedia akan terbengkalai, tidak berkembang, atau bahkan salah guna.

Selanjutnya, penyebab lain dari kemiskinan adalah lemahnya sumber daya manusia. Jika manusia tidak memiliki keterampilan maka ia tidak akan memiliki pendapatan yang menyebabkan daya belinya berkurang sehingga masuk ke dalam lingkaran kemiskinan. Ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah bahkan negara. Lemahnya sumber daya manusia akan mempengaruhi rendahnya indeks pembangunan manusia dan melemahkan pertumbuhan ekonomi (Bappeda, 2014).

Berikut adalah rangkuman beberapa penelitian yang menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan, dimana peningkatan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan kemiskinan, namun hal ini tidak mutlak berlaku pada semua pengujian (Santoso dalam Garibaldi, 2014). Begitu pula hubungan antara indeks pembangunan manusia dengan tingkat kemiskinan, dimana jika nilai indeks pembangunan manusia meningkat maka akan menurunkan tingkat kemiskinan dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Berkurangnya tingkat kemiskinan karena indeks pembangunan manusia yang meningkat mengindikasikan bahwa indeks pembangunan manusia dapat meningkatkan produktivitas kerja manusia, yang akan meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

Kondisi diatas dapat dijelaskan bahwa tidak mutlak pertumbuhan ekonomi akan dapat membawa perubahan langsung terhadap kemiskinan. Ini dikarenakan tidak meratanya pendistribusian hasil pembangunan secara adil kepada seluruh wilayah sehingga perekonomian yang tinggi hanya dinikmati oleh segelintir orang atau wilayah tertentu saja. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi kurang memberikan manfaat kepada orang-orang miskin, dan pertumbuhan tersebut juga tidak dihasilkan oleh orang banyak. Dalam hal ini, implikasi pertumbuhan ekonomi akan dirasakan oleh orang kaya terlebih dahulu, kemudian baru menetes secara perlahan ke penduduk miskin.

## KESIMPULAN

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara umum cenderung mengalami peningkatan pertahun sedangkan persentase penduduk miskin di Indonesia cenderung mengalami penurunan. Tingginya pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak menjamin tingginya kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut, fenomena ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tidak berpihak pada penduduk miskin.

Pertumbuhan ekonomi dapat berdampak positif bagi pengurangan kemiskinan bilamana pertumbuhan ekonomi yang terjadi berpihak pada penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi hendaknya menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin. Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja baik sektor pertanian atau sektorpun lain yang padat karya. Adapun secara tidak langsung, hal itu berarti diperlukan upaya pemerintah yang harus efektif meredistribusi manfaat pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan ekonomi dengan mengejar pertumbuhan ekonomi sering menghadapi pilihan dilematis antara kemajuan pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan. Pengurangan kemiskinan multidimensi, sepatutnya ditempatkan sebagai pusat perhatian dalam pembangunan ekonomi. Untuk itu dibutuhkan kesungguhan pemerintah dalam merumuskan strategi pembangunan dan kebijakan ekonomi yang tepat mengatasi kemiskinan multidimensi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda. (2014). Tinjauan Perekonomian Kota Banda Aceh Tahun 2013. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh
- Baniadi, P. (2018). Analisis Kemiskinan Multidimensi di Kota Yogyakarta. [Skripsi] Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- BPS. (2020a). Statistik Indonesia 2020. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- BPS. (2020b). Indeks Pembangunan Manusia Kota Banda Aceh Tahun 2019. Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh.
- Dewi, N. (2017). Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *Jurnal JOM Fekon*, Vol.4 No.1, Februari 2017: 870-882.
- Fuady, M., Buraida., & Fuady, M. R. F. (2020). Disaster Preparedness Collaboration Between Banda Aceh and Japan. *Proceeding The 10th Annual International Conference*, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 15-16 Oktober 2020.
- Garibaldi, M., & Hidayat, P. (2014). Analisis Hubungan IPM dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol.2: 562-572.
- Kristianto, D., & Prasetya, B. (2017). Pengaruh Jumlah Penduduk, IPM, dan TPT terhadap Kemiskinan (Pendekatan Moneter dan Multidimensi) di Indonesia. Working Paper October 2017. <https://www.researchgate.net/publication/321298837>. [diunduh 2020 Oktober 1].
- Najmi, I. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia: Panel Data 23 Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh. *Jurnal Humaniora*, Vol. 3, No. 1, April 2019: 36-47.

- Ningsih, F. A. S., & Syechalad, M. N. (2016). Analisis Pengaruh Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah*. Vol.1 No.2, November 2016: 545-554.
- Prakarsa. (2020a). Kemiskinan Multidimensi dan Risiko COVID-19 di Indonesia. Working Paper No. 01, Mei 2020. Perkumpulan Prakarsa, Jakarta.
- Prakarsa. (2020b). Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia, 2015–2018. Perkumpulan Prakarsa, Jakarta.
- Prasetyoningrum, A.K., & Sukmawati, U.S. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Equilibrium Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 6, Nomor 2, 2018: 217-240.
- Safuridar., & Putri, N.I. (2019). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Aceh Bagian Timur. *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol. 3, No. 1, April 2019: 34-46.
- Santoso, S.A., Hamzah, A., & Syechalad, M.N. (2013). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Sektor Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* Volume 1, No. 4, November 2013: 76- 88.
- Setiawan, M.B., & Hakim, A. (2013). Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. *Jurnal Economia*, Volume 9, Nomor 1, April 2013: 18-26.
- Soleh, A. (2012). Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Ekombis Review*, 2012: 197-209.
- Suryawati, C. (2005). Memahami Kemiskinan secara Multidimensional. *JMPK* Vol. 08 No.03 September 2005: 121-129.
- Wahyuningsih, Y.E., & Zamzami. (2014). Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*. Volume 1 Nomor 1, Mei 2014: 39-47.